

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1. Kesimpulan

Program Kotaku merupakan salah satu program yang dilaksanakan di Kota Bukittinggi untuk mengatasi masalah permukiman kumuh dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas permukiman yang diwujudkan secara menyeluruh di Kota Bukittinggi. Dalam menjalankan Program Kotaku, Pemerintah Kota Bukittinggi membentuk Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP). Namun, dalam pelaksanaannya tidak cukup dari Pokja PKP saja yang bekerja, dibutuhkannya dari berbagai elemen agar tujuan dari pelaksanaan Program Kotaku tercapai. Adapun elemen-elemen yang dimaksud adalah terjadinya kolaborasi dari *stakeholders* terkait, yaitu, Satuan Kerja Program Kotaku, Koordinator Kota Program Kotaku, kecamatan, kelurahan, Fasilitator Kelurahan, BKM, hingga masyarakat yang menjadi salah satu target sasaran.

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan di Kota Bukittinggi terhadap kolaborasi para *stakeholders*, dan dianalisis menggunakan teori Kolaborasi menurut Chris Ansell dan Alison Gash yang terdiri dari lima variabel, yaitu dialog antar-muka, membangun kepercayaan, komitmen, pemahaman bersama, dan dampak sementara, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Dialog antar-muka (*Face to Face Dialog*)

Pada penelitian ini, peneliti melihat dalam indikator komunikasi rutin tidak dilakukan dengan baik. Adanya jadwal tetap namun tidak dilakukan, dengan situasi tersebut berdampak pada indikator kualitas komunikasi. Pada indikator kualitas komunikasi belum terlaksana dengan efektif, minimnya komunikasi rutin serta tingkat pemahaman dari *stakeholders* yang kurang. Peneliti menyimpulkan pada variabel dialog antar-muka dalam kolaborasi *stakeholders* pelaksanaan Program Kotaku belum terlaksana.

2. Membangun Kepercayaan (*Trust Building*)

Dilihat dari sisi indikator saling menerima, pada proses kolaborasi pelaksanaan Program Kotaku terdapat kendala terkait sikap keterlibatan aktor lainnya pada tim pelaksana, seperti keanggotaan Pokja PKP serta keterlibatan BKM. Kemudian pada indikator tanggung jawab terhadap tugas yang telah ditetapkan tidak terlaksana dengan baik. Selanjutnya pada indikator keterbukan terhadap memperoleh informasi pada pelaksanaan Program Kotaku dari aktor lainnya belum terlaksana dengan baik, sejalan dengan indikator tanggung jawab yang memiliki manajemen yang baik. Berdasarkan penilaian dari ketiga indikator, maka pada proses kolaborasi dalam pelaksanaan Program Kotaku, para *stakeholders* tidak dapat membangun kepercayaan terhadap *stakeholders* lainnya.

3. Komitmen pada proses kolaborasi (*Commitment to the process*)

Pada pelaksanaan variabel komitmen, para *stakeholders* belum melakukannya dengan baik. Adanya kendala pada indikator rasa memiliki pada proses. Dilihat

pada indikator pengakuan bersama serta indikator keterbukaan terhadap pencapaian, telah ditunjukkan sikap yang baik oleh para *stakeholders* terkait.

4. Pemahaman bersama (*Share Understanding*)

Pada penelitian ini, dengan variabel pemahaman bersama sudah sepenuhnya diterapkan dengan baik. Kondisi ini dapat dilihat dari indikator misi umum oleh para *stakeholders* yang sudah paham pada terhadap misi yang mereka miliki, namun ada beberapa *stakeholders* yang tidak memiliki misi umum pada tim yang diposisikan. Namun sebaliknya pada indikator definisi masalah umum serta indikator nilai-nilai umum yang sudah dipahami dengan baik oleh seluruh *stakeholders*.

5. Dampak Sementara (*Intermediate Outcome*)

Pada variabel dampak sementara, menunjukkan motivasi lebih pada para *stakeholders*. Hal ini ditunjukkan dengan hasil capaian sementara dari Program Kotaku dengan berkurangnya masalah permukiman kumuh. Maka dengan adanya dampak sementara yang bersifat positif (*small-win*) mendukung terhadap proses kolaborasi pelaksanaan Program Kotaku di Kota Bukittinggi

Maka, dengan demikian secara keseluruhan kolaborasi *stakeholders* dalam pelaksanaan Program Kotaku tidak terlaksana dengan baik. Namun, dengan kondisi yang terjadi pada para *stakeholders* masih terjadinya peningkatan terhadap penanganan permukiman kumuh di Kota Bukittinggi. Dalam penyelenggaraan Program Kotaku ini memiliki strategi pelaksanaan dengan meningkatkan kapasitas dan peningkatan

kelembagaan yaitu mengembangkan peran serta *stakeholders* dalam penanganan permukiman kumuh di Kota Bukittinggi yang mampu berkolaborasi

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa para *stakeholders* terkait hanya berfokus pada kegiatan masing-masing tanpa ada terjadinya proses kolaborasi yang diharapkan diantara *stakeholders* Program Kotaku. Sehingga dapat diartikan bahwa, pembentukan Pokja PKP, serta pelibatan Satker, Korkot, kecamatan, hingga masyarakat hanyalah formalitas saja, sebagai syarat agar Program Kotaku dapat dilaksanakan di Kota Bukittinggi.

1.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian masih terdapat beberapa kekurangan-kekurangan dalam proses kolaborasi *stakeholders* pada pelaksanaan Program Kotaku, sehingga peneliti menyarankan beberapa *point*, yaitu:

1. Tupoksi dari masing-masing bidang dalam Pokja PKP lebih diperjelas dan disosialisasikan sehingga anggota-anggota dalam Pokja PKP dapat mengetahui tugas dan tanggung jawabnya sebagai Pokja PKP dalam pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh di Kota Bukittinggi
2. SK Pokja PKP harus dipertimbangkan dan diperbaharui lagi karena masih banyak terdapat *stakeholders* yang tercantum pada SK No. 188.45-50-2017 pada dasarnya tidak dibutuhkan dan tidak memiliki peran dalam pelaksanaan Program Kotaku.

3. Bapelitbang sebagai ketua Pokja PKP harus lebih proaktif kepada seluruh keanggotaan Pokja PKP agar seluruh anggota mampu menjalankan program sesuai dengan prosedur yang ada.
4. Para *stakeholders* yang terlibat dalam pelaksanaan Program Kotaku seharusnya dapat menyampaikan informasi kepada *stakeholders* lainnya.

Untuk penelitian selanjutnya, peneliti memiliki saran untuk melakukan penelitian terkait Program Kota Tanpa Kumuh agar penelitian ini dapat lebih dalam terkait pelaksanaan kegiatan penanganan permukiman kumuh yang dilakukan oleh masing-masing *stakeholders* terkait. Hal ini disebabkan karena keterbatasan peneliti, sehingga penelitian ini belum begitu mendalam membahas tentang pelaksanaan kegiatan penanganan permukiman kumuh dari masing-masing *stakeholders*.

